

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Proses pembangunan ekonomi di Jawa Barat telah mendorong perubahan struktur ekonomi yang substansial dalam beberapa dekade terakhir bersamaan dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal yang telah berjalan selama 20 tahun. Sebagai salah satu wilayah penggerak perekonomian nasional, Jawa Barat mempunyai rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencapai 5,6 persen per tahun.¹ Namun, ketimpangan pendapatan regional masih menjadi masalah utama yang terjadi di Provinsi Jawa Barat.

Selama periode tahun 2011-2021, ketimpangan regional yang diukur dengan Indeks Williamson, menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,5 ($IW > 0,5$) sehingga termasuk dalam kriteria ketimpangan tinggi. Hal ini berarti bahwa perbedaan PDRB pendapatan per kapita antarkabupaten/kota di Jawa Barat sangat timpang. Indeks ketimpangan regional cenderung mengalami perubahan yang dinamis selama satu dekade terakhir.



Sumber: BPS Kabupaten/Kota di Jawa Barat, diolah tahun 2022

**Gambar 1.1 Tren Indeks Williamson di Jawa Barat
Periode Tahun 2011-2021**

¹ <https://jabarprov.go.id/index.php/news/33175/2019/05/26/Pertumbuhan-Ekonomi-Jabar-Baik-5-Tahun-Terakhir>, diakses 17 Maret 2022, pukul 15.46.

Secara spasial ketimpangan regional ditunjukkan dengan jelas antara Wilayah Utara dengan Wilayah Selatan Jawa Barat. Daerah-daerah pusat industri seperti: Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Purwakarta yang berada di Wilayah Utara Jawa Barat, serta ibu kota provinsi yang berada di pusat, cenderung memiliki nilai PDRB per kapita lebih tinggi dibanding kabupaten lain yang berada di wilayah Selatan Jawa Barat.

Indikator ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah dapat mudah diamati dan saling berhubungan. Daerah yang mempunyai nilai PDRB per kapita yang rendah menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga yang dapat dibelanjakan, pengangguran yang tinggi, akses kesehatan dan pencapaian pendidikan yang lebih rendah. Korelasi yang kuat ini juga bisa diamati di tingkat subnasional, dimana suatu wilayah dengan tingkat disparitas pendapatan regional dan pengangguran yang lebih tinggi, memiliki kecenderungan menjadi wilayah dengan hasil sosial yang lebih lemah.²

Kebijakan negara untuk memperbaiki ketimpangan pendapatan ini sangat mungkin berbeda tergantung variabel-variabel yang memengaruhi keadaan ekonomi itu sendiri dan tergantung pada politik ekonomi yang dianut sebuah negara. Politik ekonomi merupakan keterlibatan pemerintah dalam perekonomian. Sedangkan politik ekonomi Islam diimplementasikan dalam bentuk intervensi negara dalam berbagai bentuk kebijakan termasuk memberlakukan regulasi, masuk ke dalam industri, menginisiasi gerakan ekonomi dan lain sebagainya. Dengan demikian bentuk kebijakan negara ini bertujuan membangun pertumbuhan ekonomi baik dalam kerangka makro maupun dalam kerangka mikro yang diimplementasikan oleh rakyatnya.³

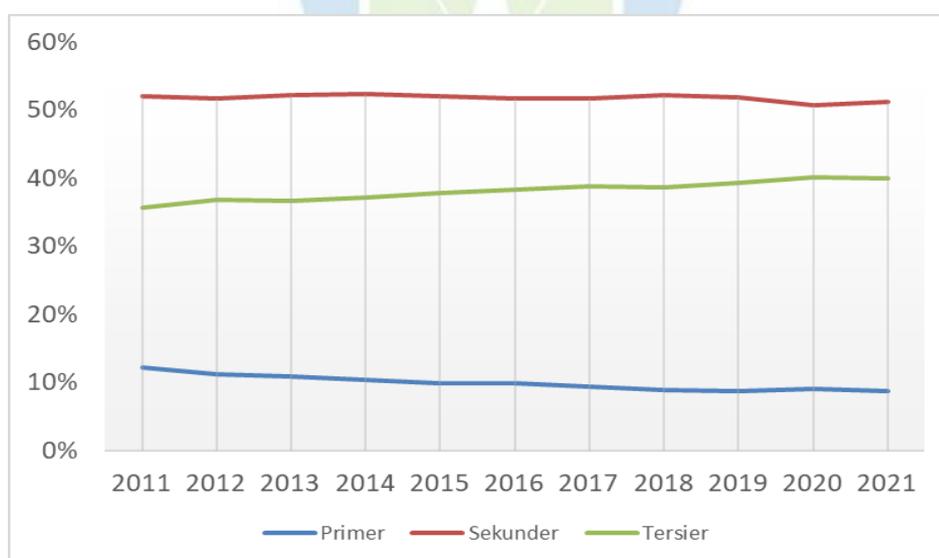
Perubahan struktural merupakan salah satu syarat pembangunan ekonomi, dimana terjadi perubahan struktur ekonomi domestik dari sektor pertanian tradisional yang subsisten, bergeser ke sektor manufaktur dan sektor jasa yang lebih

² William Gbohoui, W. Raphael Lam, dan Victor Duarte Lledo, *The Great Divide: Regional Inequality and Fiscal Policy*, (International Monetary Fund, 2019), hlm. 7.

³ Yadi Janwari, *Peradaban Ekonomi Islam* (Bandung: Rosda, 2017), hlm. 48.

beragam secara industri, lebih modern, dan lebih urban.⁴ Sebab wilayah yang masih mengandalkan sektor primer umumnya terjadi ketimpangan regional. Perubahan ini tidak hanya terkait dengan perubahan struktur ekonomi, tetapi terkait juga dengan distribusi geografis kegiatan ekonomi.

Perubahan struktur ekonomi di Jawa Barat pada satu dekade terakhir, ditandai dengan penurunan kontribusi sektor primer dan kenaikan kontribusi sektor tersier terhadap PDRB. Kontribusi sektor primer pada PDRB Jawa Barat turun dari 12,17 persen di tahun 2011 menjadi 8,78 persen di tahun 2021. Kontribusi sektor sekunder pada PDRB Jawa Barat turun dari 52,17 persen di tahun 2011 menjadi 51,23 persen di tahun 2021. Sedangkan sektor tersier mengalami kenaikan kontribusi dari sebesar 35,66 persen di tahun 2011 menjadi 39,99 persen di tahun 2021.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah Tahun 2022

Gambar 1.2 Kontribusi Sektoral pada PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2021

Gambar 1.3 menunjukkan bukti empiris mengenai perubahan struktur ekonomi di Jawa Barat yang telah masuk pada periode tersierisasi. Hal ini ditandai dengan pergeseran sektoral dari sektor primer ke sektor tersier. Di sisi lain sektor dengan produktivitas tinggi, yaitu sektor sekunder yang meliputi subsektor manufaktur dan

⁴ Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Economic Development*, (Essex: Person Education, 2003), hlm. 115.

konstruksi, cenderung tetap dan secara rata-rata hanya menunjukkan tren penurunan yang rendah.

Fenomena ini mendukung teori Fisher, bahwa perubahan struktur ekonomi merupakan peralihan atau pergeseran permintaan secara berangsur-angsur dari kegiatan produksi sektor primer ke produksi sektor sekunder dan ke produksi sektor tersier. Pergeseran ini menyebabkan perubahan dalam struktur produksi secara keseluruhan melalui realokasi tenaga kerja, alokasi modal, dan pergeseran *output*. Perbedaan tingkat produktivitas dan laju pertumbuhan masing-masing sektor berdampak pada pergeseran kontribusi masing-masing sektor dalam komposisi produksi secara keseluruhan. Kontribusi sektor primer akan semakin menurun secara relatif terhadap PDRB, walaupun hasil produksi atau produktivitas sektor primer secara absolut bertambah.

Dalam sudut pandang teori ekonomi klasik, ketimpangan pendapatan cenderung didorong oleh perubahan struktur ekonomi seperti telah dikemukakan oleh Lewis dan Kuznets. Meskipun keduanya berbeda pendapat sampai batas tertentu mengenai apakah hal ini tidak dapat dihindari, serta faktor apa yang dapat melawannya.⁵ Argumen utama dari pemikiran keduanya adalah bahwa realokasi tenaga kerja dari sektor pertanian dan sumber daya lainnya ke sektor yang lebih produktif adalah perubahan struktural utama dalam ekonomi berkembang yang mengarah kepada konvergensi keseluruhan dalam produktivitas antara pertanian dan nonpertanian. Oleh karena itu perubahan struktur ekonomi merupakan perubahan jangka panjang dalam distribusi pendapatan. Dengan kata lain, sektor-sektor ekonomi tidak tumbuh pada kecepatan yang sama, dan oleh karena itu perubahan-perubahan ini berdampak pada pasar tenaga kerja, dengan implikasi yang jelas pada distribusi pendapatan, yaitu kemiskinan dan ketimpangan.⁶

⁵ Andi Sumner and April London, "The Developer's Dilemma: The Inequality Dynamics of Structural Transformation and Inclusive Growth," *ESRC GPID Research Network Working Paper*, Vol. 1.29 (2017), hlm. 4.

⁶ Tobias Axelsson and Andrés Palacio, "Transforming Indonesia: Structural Change from a Regional Perspective 1968-2010," *Agricultural Development in the World Periphery*, Palgrave Macmillan, Cham (2018), hlm. 283.

Mekanisme perubahan struktural dan ketimpangan antarwilayah kemudian lebih dijelaskan dalam teori-teori ekonomi wilayah terutama pada gagasan *unbalance growth theory*, seperti: teori *growth pole* oleh Perroux, *cumulative causation* oleh Myrdal yang disempurnakan oleh Kaldor, serta *industrial effect* oleh Hircman. Walaupun terdapat perbedaan pandangan mengenai dampak yang ditimbulkan pada ketimpangan antarwilayah. Gambaran mengenai dampak akhir dari perubahan struktur ekonomi terhadap ketimpangan antarwilayah akan bergantung pada struktur ekonomi regional. Bagaimana ekonomi lokal saling berhubungan akan saling memberikan dampak antarwilayah satu dengan yang lain. Transformasi suatu perekonomian dari dominasi oleh beberapa sektor ke sektor lainnya, serta konsentrasi sektor yang paling dinamis atau tertinggal di wilayah tertentu akan memengaruhi proses konvergensi regional.⁷ Konvergensi merupakan suatu tendensi dari wilayah tertinggal dalam mengejar ketertinggalannya dari wilayah maju (*catching up effect*).⁸

Pengaruh antara perubahan struktural pada ketimpangan sebagai hasil dari penelitian empiris yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak seragam pada masing-masing perekonomian di berbagai negara pada kurun waktu yang cukup panjang. Sejumlah penelitian empiris awalnya mendukung hipotesis Kuznets mengenai kurva U terbalik. Namun pada perkembangan selanjutnya hipotesis Kuznet mulai dipertanyakan. Kemudian Gallup pada tahun 2012 menemukan bukti empiris dari kurva anti-Kuznets, atau tren kurva U yang tidak terbalik. Temuan Gallup ini menunjukkan bahwa ketimpangan menurun dan kemudian meningkat seiring dengan perkembangan negara.⁹

Bukti empiris terbaru menunjukkan bahwa perubahan struktural di banyak negara berkembang terjadi dari pertanian ke jasa, bukan dari pertanian ke manufaktur. Berbeda dengan hipotesis Kuznets, pemerataan pendapatan telah

⁷ Jaime Alfredo Bonet, *Decentralization, Structural Change and Regional Disparities in Colombia* (Dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2005), hlm. 5.

⁸ Robert J. Barro and Xavier Sala-i-Martin, "Convergence," *Journal of political Economy*, Vol. 100.2 (1992), hlm. 224.

⁹ Armida S. Alisjahbana, et. al., "*The Developer's Dilemma: A Survey of Structural Transformation and Inequality Dynamics*," *WIDER Working Paper*, No. 2020/35 (2020), hlm. 6.

terjadi di negara-negara yang telah mengalami transisi tenaga kerja menuju manufaktur, terlepas dari jenis negaranya. Temuan selanjutnya yaitu perpindahan pekerja ke sektor jasa tidak memiliki dampak yang terlihat pada ketimpangan secara keseluruhan. Perubahan struktural ini meningkatkan ketimpangan di negara-negara berkembang dan menurunkan tingkat ketimpangan di negara-negara maju.¹⁰

Kembali ke gagasan Kuznets dengan hipotesis awal bahwa perubahan struktural memiliki kecenderungan memperburuk ketimpangan pendapatan, hal ini dapat terjadi ketika tidak adanya intervensi kebijakan dari pemerintah.¹¹ Kuznets menganggap negara sebagai penengah di antara kepentingan kelompok dan mitigasi dampak buruk dari perubahan struktur ekonomi.¹² Demikian juga Lewis yang menekankan bahwa ketika ketimpangan pada masa transisi meningkat maka intervensi kebijakan publik oleh negara diperlukan karena munculnya kelas kapitalis.¹³ Berdasarkan kedua gagasan ini dengan jelas ditegaskan bahwa peran negara sangat penting dalam mengelola ketimpangan yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi. Walaupun ketimpangan ini berakar dari masalah ekonomi, secara politis ketimpangan regional yang tinggi dapat mendorong tuntutan untuk menjadikan daerah otonom baru dan tingkat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi.

Dalam menghadapi ketimpangan regional yang semakin meningkat, pemerintah pusat dapat bergerak untuk memusatkan atau mendesentralisasikan sumber daya fiskal tergantung pada apakah menurut pemerintah sentralisasi atau desentralisasi akan berkontribusi terhadap konvergensi regional.¹⁴ Desentralisasi fiskal menjadi afirmasi kebijakan pemerintah pusat yang dapat berpengaruh pada

¹⁰ Cinar Baymul and Kunal Sen, "Was Kuznets Right? New Evidence on the Relationship between Structural Transformation and Inequality," *The Journal of Development Studies*, Vol. 56.9 (2020), hlm. 1643-1662.

¹¹ Alisjahbana, et. al., "The Developer's Dilemma," hlm. 3.

¹² Moshe Syrquin, "Kuznets and Pasinetti on the Study of Structural Transformation: Never the Twain Shall Meet?" *Structural Change and Economic Dynamics*, Vol. 21.4 (2010), hlm. 251.

¹³ Sumner and London, "The developer's Dilemma," hlm. 22.

¹⁴ Christian Lessmann, "Fiscal Decentralization and Regional Disparity: Evidence from Cross-Section and Panel Data," *Environment and Planning A*, Vol. 41.10 (2009), hlm. 2455.

ketimpangan pendapatan secara keseluruhan.¹⁵ Dalam konteks kepentingan ekonomi, desentralisasi fiskal merupakan transfer anggaran disertai kewenangan kepada pemerintah subnasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik, sehingga dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.¹⁶

Dari perspektif teoretis, desentralisasi fiskal dipandang dapat mempersempit atau memperlebar ketimpangan regional. Pada satu sisi, desentralisasi dapat mengurangi ketimpangan regional karena menyiratkan kebijakan yang lebih terinformasi dan lebih spesifik. Di sisi lain, terdapat argumen teoretis yang berlawanan sehingga menjadikan efek desentralisasi pada ketimpangan regional menjadi ambigu. Prud'homme memandang bahwa pemerintah yang tersentralisasi, akan memiliki kekuatan penyeimbang yang lebih besar karena kapasitas fiskalnya yang lebih besar dibandingkan dengan yang terdesentralisasi.¹⁷

Praktek desentralisasi fiskal di Jawa Barat telah berjalan selama dua dekade terakhir sejak diberlakukan oleh pemerintah pusat, secara umum menunjukkan ketergantungan fiskal yang cukup tinggi kepada pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan oleh indeks desentralisasi fiskal yang diukur dengan FDI (*Fiscal Decentralization Index*) menunjukkan rendahnya tingkat otonomi fiskal yang terjadi di sebagian besar kabupaten/kota.

Tabel 1.1 Rata-Rata Nilai Indeks Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011-2021

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata FDI
1	Bogor	0,172
2	Sukabumi	0,391
3	Cianjur	0,341
4	Bandung	0,079

¹⁵ Agnese Sacchi and Simone Salotti, *Income Inequality, Regional Disparities, and Fiscal Decentralization in Industrialized Countries*, (Department of Economics, National University of Ireland, 2011), hlm. 3.

¹⁶ Wallace E. Oates, "An Essay on Fiscal Federalism," *Journal of economic literature*, Vol. 37.3 (1999), hlm. 1120.

¹⁷ Remy Prud'homme, "The Dangers of Decentralization," *The world bank research observer*, Vol. 10.2 (1995), hlm. 201-220.

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata FDI
5	Garut	0,143
6	Tasikmalaya	0,156
7	Ciamis	0,105
8	Kuningan	0,123
9	Cirebon	0,289
10	Majalengka	0,103
11	Sumedang	0,126
12	Indramayu	0,180
13	Subang	0,134
14	Purwakarta	0,147
15	Karawang	0,153
16	Bekasi	0,068
17	Bandung Barat	0,382
18	Pangandaran	0,375
19	Kota Bogor	0,343
20	Kota Sukabumi	0,255
21	Kota Bandung	0,354
22	Kota Cirebon	0,259
23	Kota Bekasi	0,157
24	Kota Depok	0,226
25	Kota Cimahi	0,141
26	Kota Tasikmalaya	0,152
27	Kota Banjar	0,092

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, diolah tahun 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata FDI kabupaten/kota di Jawa Barat periode tahun 2011-2021 berkisar antara 0,067 atau sebesar 6,7% di Kabupaten Pangandaran dengan nilai terendah, sedangkan nilai FDI tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bekasi sebesar 0,39 atau 39%. Berdasarkan ukuran nilai Indeks Kemandirian Fiskal Daerah, maka tiap daerah dapat dikelompokkan ke dalam

kategori: a) Belum Mandiri, nilai FDI lebih kecil 0,25; b) Menuju Kemandirian, nilai FDI berkisar antara 0,25-0,50; c) Mandiri, nilai FDI berkisar antara 0,50-0,75; dan d) Sangat Mandiri dimana nilai FDI lebih dari 0,75.¹⁸

Daerah yang masih termasuk pada kategori “Belum Mandiri” sebanyak 18 daerah. Mulai dari indeks terkecil sampai terendah yaitu: Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kota Banjar, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Cimahi. Sedangkan sisanya masuk dalam kategori “Menuju Kemandirian” sebanyak sembilan daerah, yaitu: Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bekasi.

Dari kriteria ini dapat kita ketahui bahwa kemandirian fiskal kabupaten/kota di Jawa Barat mayoritas masih dalam kategori belum mandiri dan menuju kemandirian, sehingga masih terjadi ketergantungan pada dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Ketergantungan kepada transfer pemerintah pusat akan cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Ketergantungan ini dapat menghambat proses penyesuaian dan konvergensi. Sebaliknya ketergantungan pada sumber pendapatan sendiri akan mendorong pemerataan.¹⁹

Studi empiris yang telah dilakukan menyajikan gambaran yang beragam tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan regional. Bukti-bukti empiris umumnya mendukung argumen bahwa desentralisasi fiskal akan cenderung mengurangi ketimpangan regional, namun tergantung pada tingkat pembangunan ekonomi dan kualitas pemerintahan. Pada studi empiris yang lain desentralisasi fiskal dapat memperluas ketimpangan regional karena memicu persaingan regional

¹⁸ Sampurna, “Menuju Manual Review Desentralisasi Fiskal,” Rapat Kerja Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (AKN V dan AKN VI) BPK di Banyuwangi Tanggal 18 September 2018.

¹⁹ Yingyi Qian and Barry R. Weingast, "Federalism as a Commitment to Reserving Market Incentives," *Journal of Economic perspectives*, Vol. 11.4 (1997), hlm. 83-92.

dalam menyerap sumber daya ekonomi, dan membatasi eksternalitas positif antar dan intraregional yang diciptakan oleh kebijakan redistribusi terpusat.²⁰

Tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan efisiensi sektor publik, sehingga dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, teori-teori ekonomi pembangunan klasik juga lebih banyak menekankan pada hubungan antara perubahan struktural dan pertumbuhan ekonomi. Industrialisasi dipandang sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi, karena realokasi tenaga kerja yang berasal dari sektor pertanian tradisional yang memiliki produktivitas yang rendah bergeser menuju sektor manufaktur yang lebih produktif merupakan ciri utama pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya merujuk pada model Solow, kondisi akhir dari proses ini adalah terciptanya kondisi *steady state* yang akan mendorong konvergensi pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah.

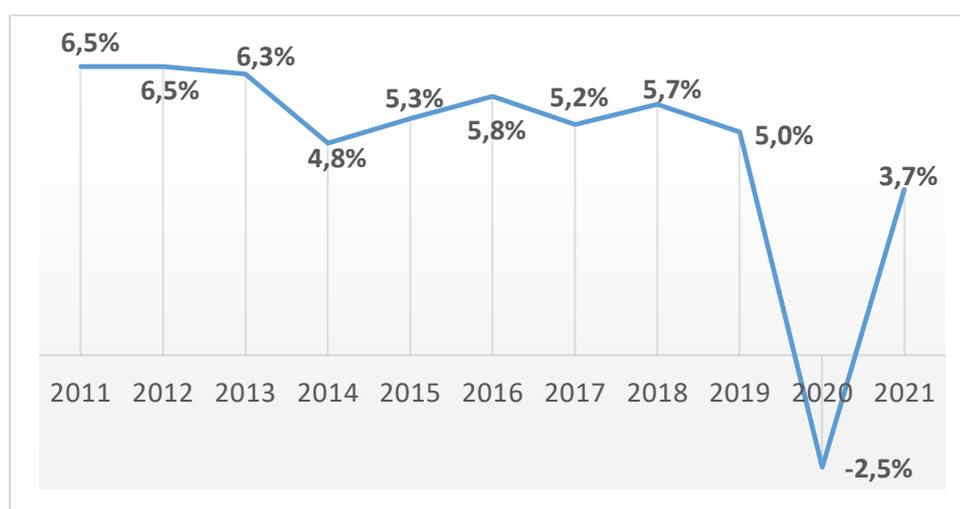
Pertumbuhan ekonomi seringkali dijadikan sebagai tujuan utama dalam kebijakan pembangunan. Asumsinya, jika terjadi laju pertumbuhan yang tinggi pada suatu wilayah maka dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di dalam wilayah tersebut. Selain itu, hasil dari laju pertumbuhan ekonomi tinggi bisa dinikmati seluruh masyarakat secara merata. Namun pada faktanya, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²¹ Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi berpotensi menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Proses perubahan struktur ekonomi pada satu sisi, disertai dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal pada sisi lain telah mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pada tahun 2011-2021 mencapai angka 4,8 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi pada 2011 tercatat 6,5 persen merupakan pertumbuhan tertinggi sampai tahun 2021 yang terus mengalami tren penurunan hingga mencapai nilai 3,7 persen. Pertumbuhan ekonomi paling rendah terjadi di tahun 2020, mencapai minus 2,5

²⁰ Andreas P. Kyriacou, Leonel Muinelo-Gallo and Oriol Roca-Sagalés., "Regional Inequalities, Fiscal Decentralization and Government Quality," *Regional Studies*, Vol. 51.6 (2016), hlm. 3.

²¹ Leonardo Gasparini and Nora Lustig, "The Rise and Fall of Income Inequality in Latin America," *Documento de Trabajo*, No. 118 (2011), hlm. 2-3.

persen. Pada saat yang bersamaan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan dunia mengalami tren perlambatan karena Pandemi Covid 19 yang berdampak pada sektor ekonomi. Walaupun demikian, perbandingan dengan provinsi lain di pulau Jawa pada sisi pertumbuhan ekonomi secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik. Tren pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat disajikan dalam Gambar 1.3 di bawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, PDRB ADH Konstan, diolah 2022

**Gambar 1.3 Tren Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat
Tahun 2011-2021**

Studi empiris mengenai pengaruh antara perubahan struktural dan pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan hasil yang kurang meyakinkan. Sebagian studi menemukan pengaruh positif, dan pada studi yang lain bukti pengaruh negatif juga telah ditemukan. Sementara itu, Jiang menemukan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi regional bergantung pada perubahan struktural untuk pertumbuhan produktivitas tenaga kerja seiring dengan pertumbuhan ekonomi.²² Selanjutnya untuk kasus Indonesia Andriansyah dkk., telah menunjukkan bahwa perubahan struktural di tingkat subnasional merupakan determinan pertumbuhan

²² McMillan, et. al., (2017), Jiang (2011) dalam Andriansyah Andriansyah, Asep Nurwanda, dan Bakhtiar Rifai. "Structural Change and Regional Economic Growth in Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* just-accepted (2021), hlm. 1-34.

ekonomi yang signifikan, namun pertumbuhan akan terjadi jika terjadi peningkatan produktivitas, tidak hanya pergerakan tenaga kerja lintas sektor.²³

Mekanisme yang menghubungkan pertumbuhan dan ketimpangan lebih banyak dibahas secara luas dalam literatur empiris dan telah menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian studi menemukan pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan,²⁴ di sisi lain bukti pengaruh negatif juga banyak ditemukan. Studi yang dilakukan oleh Arbia dan Dominicus di Uni Eropa menemukan fakta bahwa pertumbuhan pada awalnya menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan yang terkonsentrasi dan meningkatkan pertumbuhan. Temuan ini berseberangan dengan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sarana utama dalam mengurangi ketimpangan regional.²⁵

Berdasarkan uraian permasalahan mengenai ketimpangan regional serta faktor-faktor yang memengaruhinya baik secara teoretis maupun empiris, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Pada perekonomian Jawa Barat, di satu sisi menunjukkan model ganda yang masih mengandalkan subsektor pertanian, stagnasi subsektor industri, serta pertumbuhan yang tinggi dari subsektor jasa. Namun pada sisi lain menunjukkan masalah ketimpangan pendapatan regional yang tinggi dan menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan demikian, perubahan struktural disertai distribusi spasial kegiatan ekonomi, pelaksanaan desentralisasi fiskal serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya memiliki implikasi terhadap penurunan ketimpangan regional di Jawa Barat. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena secara ekonomi diyakini bahwa kinerja ekonomi dalam jangka panjang akan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi pendapatan yang terus berlanjut.²⁶

²³ Andriansyah, et. al., "Structural Change and Regional Economic Growth in Indonesia," hlm. 1-34.

²⁴ S. Lestari and Ratna S. Gunawan, "Economic Growth and Income Disparity between Regencies/Cities in West Java Province," *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, Vo. 12.2 (2017), hlm. 43-49

²⁵ Arbia, de Dominicus, and Piras, "Regional Growth and Regional Inequality in EU and Transition Countries: A Spatial Econometric Approach," *In ERSA Congress*.

²⁶ Joseph E. Stiglitz, "Inequality and Economic Growth," *Rethinking Capitalism*, Vol. 86.1 (2015), hlm. 134.

Studi ini mengkaji pengaruh perubahan struktur ekonomi, desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi pada ketimpangan regional di Jawa Barat. Adapun judul penelitian ini yaitu: **Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi dan Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Regional di Jawa Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Mediasi.**

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam studi ini adalah tingginya tingkat ketimpangan regional di Jawa Barat yang berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Analisis difokuskan pada pengaruh faktor-faktor penyebab ketimpangan regional yaitu perubahan struktur ekonomi, desentralisasi fiskal, dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pokok masalah yang diteliti, maka rumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Apakah terdapat pengaruh antara perubahan struktur ekonomi pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat?
2. Apakah terdapat pengaruh antara perubahan struktur ekonomi pada ketimpangan regional di Jawa Barat?
3. Apakah terdapat pengaruh antara desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat?
4. Apakah terdapat pengaruh antara desentralisasi fiskal pada ketimpangan regional di Jawa Barat?
5. Apakah terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi pada ketimpangan regional di Jawa Barat?
6. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung perubahan struktur ekonomi pada ketimpangan regional dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi di Jawa Barat?
7. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung desentralisasi fiskal pada ketimpangan regional dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi di Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara perubahan struktural, desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan regional di Jawa Barat. Maka, secara spesifik bertujuan untuk memberikan jawaban setiap pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh perubahan struktur ekonomi pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh perubahan struktur ekonomi pada ketimpangan regional di Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal pada ketimpangan regional di Jawa Barat.
5. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi pada ketimpangan regional di Jawa Barat.
6. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung perubahan struktur ekonomi pada pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi di Jawa Barat.
7. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung desentralisasi fiskal pada ketimpangan regional dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi di Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat baik pada sisi teoretis maupun praktis, yaitu:

1. Pada sisi teoretis, hasil penelitian dapat berkontribusi bagi: a) pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam yang berkaitan ketimpangan pendapatan, faktor penyebabnya serta pengaruhnya khususnya perubahan struktural, desentralisasi fiskal, dan pertumbuhan ekonomi; b) sebagai salah satu sumber pembelajaran mata kuliah ekonomi makro atau ekonomi pembangunan

khususnya materi ketimpangan pendapatan; dan c) sebagai sumbangan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Pada sisi praktis, hasil penelitian dapat berkontribusi pada beberapa pihak, yaitu: a) mahasiswa, sebagai sumber pembelajaran pada materi ketimpangan pendapatan sehingga mahasiswa mampu menganalisis lebih dalam mengenai faktor penyebab dan bagaimana pengaruhnya pada ketimpangan pendapatan; b) pemerintahan daerah yang ada di wilayah Jawa Barat maupun nasional dalam menyusun strategi kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan pendapatan regional berbasis perekonomian spasial dengan memperhatikan perubahan struktur ekonomi dan pengelolaan fiskal daerah yang tertuang dalam APBD; dan c) masyarakat umum, sebagai bahan rekomendasi dalam proses partisipasi dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan pendapatan regional berbasis pengembangan sektor ekonomi seperti: pertanian, industri, dan jasa.

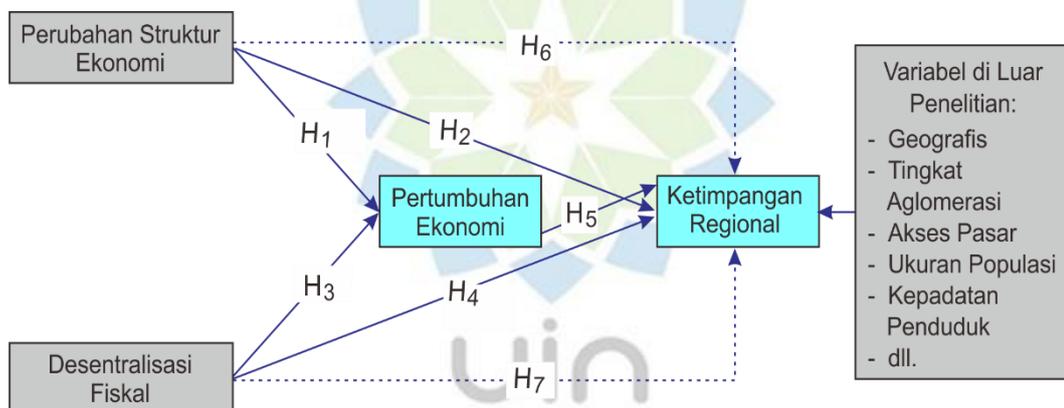
E. Kerangka Berpikir

Ciri perubahan struktur ekonomi adalah realokasi tenaga kerja dan modal dari sektor primer menuju sektor sekunder atau dari sektor primer menuju sektor tersier yang berdampak pada distribusi pendapatan. Realokasi ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang secara kontinyu, sehingga berdampak pada produktivitas tiap sektor dalam hal *output* barang dan jasa secara agregat. Perubahan *output* secara agregat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan tiap sektor ekonomi di tiap wilayah tidak sama kecepatannya, maka keadaan ini mendorong terjadinya ketimpangan regional.

Dalam menghadapi ketimpangan regional yang semakin meningkat, pemerintah pusat mendesentralisasikan sumber daya fiskal. Desentralisasi fiskal dalam bentuk transfer fiskal dan kewenangan dari pusat ke daerah diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur, permintaan barang dan jasa, serta penyediaan layanan publik oleh pemerintah daerah. Penyediaan infrastruktur serta permintaan barang dan jasa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, desentralisasi fiskal menyerahkan kewenangan kepada pemerintahan daerah agar dapat

mengelola potensi sumber daya yang dimiliki dengan lebih efisien, sehingga daerah yang tertinggal dapat memperbaiki ketertinggalannya dan memperbaiki ketimpangan regional.

Berdasarkan mekanisme logis ini, maka perubahan struktur ekonomi, desentralisasi fiskal, dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan kausal dengan ketimpangan regional. Hubungan kausal tersebut terdiri dari pengaruh variabel perubahan struktur ekonomi dan desentralisasi fiskal sebagai variabel eksogen terhadap variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel endogen perantara, serta variabel ketimpangan regional sebagai endogen terikat. Untuk lebih jelas, hubungan antarvariabel divisualisasikan dalam model penelitian di bawah ini:



Sumber: Model yang dikembangkan peneliti

Gambar 1.4 Model Penelitian

Pengaruh antarvariabel dalam model penelitian yang dikembangkan peneliti dibangun berdasarkan teori-teori. Dasar-dasar teori dalam pengaruh antarvariabel terdiri dari:

1. Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi pada Pertumbuhan Ekonomi (H₁)

Perubahan struktural merupakan salah satu syarat pembangunan ekonomi yang mensyaratkan pertumbuhan dalam sektor ekonomi.²⁷ Kaldor menyatakan bahwa

²⁷ Andreas Dietrich, "Does Growth Cause Structural Change, or is it the Other Way Around? A Dynamic Panel Data Analysis for Seven OECD Countries," *Empirical economics*, Vol. 43.3 (2012), hlm. 915-944.

pembangunan ekonomi memerlukan industrialisasi karena peningkatan pengembalian di sektor manufaktur berarti pertumbuhan *output* manufaktur yang lebih cepat yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, pengembangan manufaktur merupakan mesin pertumbuhan bagi setiap negara pada setiap tahap perkembangan ekonomi.²⁸

Dengan menggunakan model ekonomi ganda Lewis yang menjelaskan akumulasi modal melalui transisi yang didorong oleh pergerakan tenaga kerja yang berasal dari sektor tradisional menuju sektor modern yang berdampak pada peningkatan produktivitas pekerja, produktivitas keseluruhan negara, dan *output* per kapita.²⁹ Dengan demikian sifat utama dari dinamika perubahan struktur ekonomi adalah pergeseran input faktor produksi dari sektor yang memiliki produktivitas yang lebih rendah menuju sektor yang memiliki produktivitas yang lebih tinggi secara terus-menerus sehingga meningkatkan produktivitas pada tingkat agregat.³⁰

2. Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi pada Ketimpangan Regional (H₂)

Perubahan struktur ekonomi terdiri dari perubahan yang terjadi dalam komposisi *output* serta serapan tenaga kerja dalam struktur ekonomi yang berimplikasi pada distribusi pendapatan.³¹ Perbedaan struktur ekonomi yang ada di setiap wilayah merupakan hasil dari pola perubahan struktural.³² Karena pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tidak mempunyai kecepatan yang sama, maka pengaruh perubahan struktur ekonomi berdampak pada ketimpangan pendapatan.

Analisis hubungan antara perubahan struktural dan ketimpangan merujuk Kuznets dengan hipotesis kurva U terbalik yang menyatakan bahwa ketimpangan

²⁸ Sumner and London, "The Developer's Dilemma," hlm. 18.

²⁹ Sumner and London, "The Developer's Dilemma," hlm. 19-20.

³⁰ Khuong M. Vu, "Structural Change and Economic Growth: Empirical Evidence and Policy Insights from Asian Economies." *Structural Change and Economic Dynamics*, Vol. 41 (2017), hlm. 64-77.

³¹ Simon Kuznets and John Thomas Murphy, *Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread* (New Haven: Yale University Press, Vol. 2, 1966), hlm. 76.

³² Alisjahbana, et. al., "The Developer's Dilemma," *WIDER Working Paper*, No. 2020/35 (2020), hlm. 9.

akan naik dan kemudian akan turun pada tahap selanjutnya. Kuznets secara implisit mengambil model ekonomi ganda Lewis. Ketimpangan dalam dua sektor ini dijelaskan ketika kedua sektor memiliki ukuran yang berbeda, realokasi dari sektor pertanian ke sektor lain akan mengubah varians dari distribusi pendapatan secara keseluruhan. Hilangnya dualisme berkaitan dengan produktivitas yang setara antarsektor dan dampak dualisme pada kurangnya pemerataan distribusi pendapatan. Meskipun prosesnya sulit diperkirakan, evolusi ketimpangan pendapatan perlu diselidiki secara empiris.³³

3. Pengaruh Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi (H₃)

Pengaruh desentralisasi fiskal dalam perekonomian didukung oleh argumen utama yang merujuk pada Oates, bahwa transfer kekuasaan kepada pemerintah subnasional meningkatkan efisiensi sektor publik, dan dengan demikian mendorong pembangunan serta pertumbuhan ekonomi.³⁴ Jika pemerintah daerah memiliki keuntungan dalam membuat pengeluaran publik lebih efisien, maka keuntungan "statis" ini dapat juga hadir dalam arti yang "dinamis" yaitu membuat pengeluaran pemerintah daerah lebih bisa meningkatkan pertumbuhan.³⁵

Selanjutnya peran pemerintah dalam perekonomian yaitu melindungi pasar. Gagasan utamanya adalah pemerintah dapat melakukan monopoli dan memiliki kekuatan untuk mengeksploitasi sektor swasta.³⁶ Dalam pengaturan yang terdesentralisasi, persaingan fiskal membatasi kemampuan pemerintah untuk menarik sewa, sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.³⁷

Kebijakan keuangan publik mempunyai dimensi baku yaitu: efisiensi, stabilitas makro ekonomi, dan keadilan.³⁸ Merujuk pada Sewell, jika anggaran direncanakan

³³ Sumner and London, "The Developer's Dilemma," hlm. 27.

³⁴ Wallace E. Oates, "An Essay on Fiscal Federalism," hlm. 1120-1149.

³⁵ Jorge Martinez-Vazquez and Robert M. McNab, "Fiscal Decentralization and Economic Growth," *World Development*, Vol. 31.9 (2003), hlm. 14

³⁶ Qian and Weingast, "Federalism as a Commitment," hlm. 83-92.

³⁷ Lessmann, "Fiscal Decentralization and Regional Disparity," hlm. 2455.

³⁸ Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, (Singapore: Mc-Graw-Hill Book Co, 1989), hlm. 6.

sebelumnya, stabilisasi kemungkinan besar berasal dari efek bawaan pajak dan dana transfer tertentu. Maka, desentralisasi fiskal akan berdampak pada stabilitas makroekonomi dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi.³⁹

4. Pengaruh Desentralisasi Fiskal pada Ketimpangan Regional (H4)

Dalam menghadapi ketimpangan regional yang semakin meningkat, pemerintah pusat dapat bergerak untuk memusatkan atau mendesentralisasikan sumber daya fiskal agar berkontribusi terhadap konvergensi regional. Maka dengan desentralisasi fiskal daerah tertinggal dapat memperbaiki ketertinggalannya (*catching up effect*). Otoritas yang terdesentralisasi memiliki informasi yang lebih baik tentang kebutuhan lokal dan dapat menyediakan barang publik lokal dengan kuantitas dan kualitas yang efisien secara ekonomi. Khususnya dalam kasus federasi dengan daerah yang heterogen, pejabat yang didesentralisasi mempunyai posisi yang dekat dengan konstituen untuk memenuhi tuntutan lokal.⁴⁰

Desentralisasi fiskal dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan secara keseluruhan, dengan cara langsung atau tidak langsung. Pengaruh langsung pada ketimpangan dapat dipicu oleh perubahan progresifitas sistem pajak atau komposisi pengeluaran publik. Sedangkan pengaruh tidak langsung bekerja melalui sejumlah faktor sosial-ekonomi seperti: pertumbuhan, stabilitas, tingkat pengembangan kelembagaan, dan ukuran intervensi pemerintah dalam perekonomian.⁴¹

Argumen teoretis lain yang berlawanan sehingga menjadikan pengaruh desentralisasi fiskal pada ketimpangan regional menjadi ambigu disampaikan oleh Prud'homme. Desentralisasi mengarah pada tingginya persaingan fiskal antardaerah. Daerah yang lebih maju akan lebih menarik bagi faktor produksi yang bergerak dari daerah lain, karena daerah maju akan menyediakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, tersedianya akses pasar, serta infrastruktur yang berkualitas dengan biaya yang relatif rendah. Dalam keadaan ini, jika desentralisasi

³⁹ David O. Sewell, "The Dangers of Decentralization" According to Prud'homme: Some Further aspects," *The World Bank Research Observer*, Vol. 11.1 (1996), hlm. 147.

⁴⁰ Wallace E. Oates, "Toward a Second-Generation Theory of Fiscal Federalism," *International Tax and Public Finance*, Vol. 12.4 (2005), hlm. 349-373.

⁴¹ Sacchi and Salotti, *Income Inequality*, hlm. 3.

berlangsung, daerah maju akan semakin makmur sedangkan daerah tertinggal akan semakin miskin, maka desentralisasi fiskal berpengaruh pada semakin tingginya ketimpangan regional.⁴²

5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Ketimpangan Regional (H₅)

Hubungan ini pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan regional berdasarkan pendapat Kuznets dan Lewis karena mempunyai kesamaan dengan sifat perubahan struktur ekonomi. Menurut Kuznet, perubahan struktur ekonomi melalui pergeseran tenaga kerja dan modal dari sektor dengan produktifitas yang lebih rendah ke arah sektor dengan produktivitas tinggi akan meningkatkan produktifitas *output* secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan pada awalnya akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemudian ketimpangan akan menurun sejalan dengan perkembangan pembangunan.

Tetapi pada model Lewis, pengayaan sektor tradisional dan modern akan cenderung menarik ketimpangan ke arah yang berlawanan, sehingga perubahan ketimpangan masih ambigu, dan validitas kurva Kuznets adalah pertanyaan empiris. Walaupun demikian, tahap kenaikan lalu penurunan ketimpangan sesuai dengan Kurva Kuznet merupakan hal yang tidak dapat dihindari.⁴³

6. Pengaruh Tidak Langsung Perubahan Struktur Ekonomi pada Ketimpangan Regional melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Mediasi (H₆)

Berdasarkan model Lewis terdapat analisis tiga jenis perkembangan dualistik dengan menggunakan Kurva Lorentz yang dikemukakan oleh Fields, yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi pada penguatan sektor tradisional, pendapatan yang dihasilkan akan lebih tinggi dengan distribusi yang relatif lebih merata; 2) pertumbuhan ekonomi pada penguatan sektor modern, pendapatan yang dihasilkan akan lebih tinggi dengan distribusi yang relatif kurang merata; dan 3) pertumbuhan ekonomi pada perluasan sektor modern, menghasilkan pendapatan yang meningkat, tetapi kurva Lorentz akan selalu bersilangan, pertumbuhan mungkin akan

⁴² Sacchi and Salotti, *Income Inequality*, hlm. 7.

⁴³ Todaro and Smith, *Economic Development*, hlm. 224-225.

meningkatkan atau memperburuk ketimpangan, ketimpangan kemungkinan akan memburuk pada tahap awal pembangunan dan kemudian membaik.⁴⁴ Berdasarkan hal ini, maka perubahan struktur ekonomi akan berpengaruh tidak langsung pada ketimpangan regional melalui pertumbuhan ekonomi.

7. Pengaruh Tidak Langsung Desentralisasi Fiskal pada Ketimpangan Regional melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Mediasi (H₇)

Hubungan ini berdasarkan pada pendapat Sacchi dan Salotti yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal, dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan secara keseluruhan secara tidak langsung melalui sejumlah faktor sosial-ekonomi salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi.⁴⁵ Pada sisi lain, desentralisasi fiskal akan berdampak pada stabilitas makroekonomi dengan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal ini, maka perubahan struktur ekonomi akan berpengaruh tidak langsung pada ketimpangan regional melalui pertumbuhan ekonomi.

F. Hipotesis Penelitian

Model penelitian yang dikembangkan dalam kerangka berpikir menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis hubungan antarvariabel penelitian ini, yaitu:

- H₁ : Perubahan struktur ekonomi berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi.
- H₂ : Perubahan struktur ekonomi berpengaruh signifikan pada ketimpangan regional.
- H₃ : Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi.
- H₄ : Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan pada ketimpangan regional.
- H₅ : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan pada ketimpangan regional.
- H₆ : Terdapat pengaruh tidak langsung perubahan struktur ekonomi pada ketimpangan regional dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi.

⁴⁴ Gary S. Fields, *Poverty, Inequality and Development* (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), hlm. 46-56.

⁴⁵ Sacchi and Salotti, *Income Inequality*, hlm. 3.

H₇ : Terdapat pengaruh tidak langsung desentralisasi fiskal pada ketimpangan regional dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian adalah lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai hubungan perubahan struktur ekonomi, desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan regional. Metode, hasil, serta perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini dijelaskan dalam Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi pada Pertumbuhan Ekonomi				
1	<i>Does Growth Cause Structural Change, or Is It the Other Way Round? A Dynamic Panel Data Analyses for Seven OECD Countries</i> Dietrich, 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel di tujuh negara OECD periode tahun 1960-2004 - Ukuran Perubahan struktural menggunakan <i>Norm Absolute Value (NAV)</i> - Teknik analisis data menggunakan Uji Kausalitas Granger. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan ekonomi menyebabkan perubahan struktural. - Perubahan struktural memengaruhi pertumbuhan ekonomi karena peningkatan produktivitas sektoral. - Kausalitas yang heterogen di tiap negara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran perubahan struktural menggunakan <i>Modified Lilien Indeks (MLI)</i>. - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel.

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
2	<i>Analyzing the Structural Change and Growth Relationship in India: State-level Evidence</i> Cortuk & Singh, 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan analisis data panel untuk 16 negara bagian utama India periode tahun 2000-2006 - Ukuran Perubahan struktural menggunakan <i>Norm Absolute Value (NAV)</i> dan <i>Modified Lilien Index (MLI)</i> - Teknik analisis data menggunakan regresi <i>Fixed Effect</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan struktur ekonomi di India signifikan dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak sebaliknya. - Perubahan struktural berpengaruh positif searah pada pertumbuhan ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat - Ukuran perubahan struktural menggunakan <i>Modified Lilien Indeks (MLI)</i>. - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
3	<i>Structural Change and Regional Economic Growth in Indonesia</i> Andriansyah, dkk., 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel untuk 30 provinsi di Indonesia periode 2005-2018 - Ukuran perubahan struktural menggunakan <i>Norm Absolute Value (NAV)</i>, metode <i>Shift-Share</i>, dan indeks perubahan struktural efektif. - Teknik analisis data menggunakan model dinamis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan struktural telah terjadi di seluruh provinsi, meskipun melambat, menuju transisi pertanian-jasa. - Perubahan struktural merupakan determinan yang signifikan terhadap pertumbuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran perubahan struktural menggunakan <i>Modified Lilien Indeks (MLI)</i> - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi pada Ketimpangan Regional				
4	<i>The Impacts of Structural</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel tingkat regional untuk 22 provinsi di China 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses perubahan struktural di Cina telah meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	<p><i>Transformation and Industrial Upgrading on Regional Inequality in China</i></p> <p>Cheong & Wu, 2013</p>	<p>dari tahun 1997-2010</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran ketimpangan regional menggunakan Koefisien Gini dengan rumus pembobotan populasi - Teknik analisis data yang digunakan adalah dekomposisi 	<p>ketimpangan regional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industrialisasi merupakan penyumbang terbesar ketimpangan regional di semua tingkat spasial. - Akar permasalahan ketimpangan adalah ketimpangan distribusi industrialisasi. - Ketidakmerataan dalam distribusi industrialisasi dapat sangat memperburuk ketimpangan regional. 	<p>tahun 2011-2021 di Jawa Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran perubahan struktural menggunakan <i>Modified Lilien Indeks (MLI)</i> - Ukuran ketimpangan pendapatan menggunakan Indeks Ketimpangan Relatif - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
5	<p><i>Structural Change and Income Inequality - Agricultural Development and Inter-Sectoral Dualism in The Developing World, 1960-2010</i></p> <p>Anderson, dkk. 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Selatan periode tahun 1960-2010. - Ukuran perubahan struktural melalui kesenjangan produktivitas antara pertanian dan non-pertanian, menggunakan Gini 	<ul style="list-style-type: none"> - Sektor jasa telah menjadi pemberi kerja utama, sedangkan sektor pertanian telah terjadi peningkatan produktivitas dan menjadikannya pusat distribusi pendapatan untuk kemiskinan di pedesaan, tetapi surplus tenaga kerja masih tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran perubahan struktural menggunakan <i>Modified Lilien Indeks (MLI)</i> - Ukuran ketimpangan pendapatan menggunakan

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
		<p>antarsektor (<i>Synthetic Gini</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran ketimpangan pendapatan menggunakan koefisien Gini versi 5.0. - Analisis data yang digunakan adalah model ekonometrika 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesenjangan antar-sektor berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. - Pengaruh ini dapat diabaikan di negara-negara agraris dan ekonomi maju, tetapi kuat di negara-negara pemula ekonomi ganda. 	<p>Indeks Ketimpangan Relatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
6	<p><i>Structural Changes and Regional Income Inequality in Indonesia: A Bidimensional Decomposition Analysis</i></p> <p>Akita, dkk. 2009</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel berbasis provinsi di Indonesia dari tahun 1983-2004. - Ukuran perubahan struktural menggunakan <i>share</i> sektor ekonomi dalam PDRB - Ukuran ketimpangan wilayah menggunakan Indeks Theil dan koefisien variasi tertimbang populasi pada data PDRB per kapita provinsi berdasarkan Industri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan struktur dari sektor primer ke sektor sekunder berpengaruh positif pada ketimpangan antarwilayah terutama di Sumatera dan Kalimantan - Sedangkan di ibukota ketimpangan tidak hanya dipengaruhi oleh transformasi ke sektor tersier, tetapi juga oleh faktor globalisasi dan liberalisasi perdagangan pada rentang waktu penelitian. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran perubahan struktural menggunakan <i>Modified Lilién Indeks (MLI)</i> - Ukuran ketimpangan pendapatan menggunakan Indeks Ketimpangan Relatif - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
		<ul style="list-style-type: none"> - Teknik analisis data menggunakan metode dekomposisi dua dimensi berdasarkan kelompok regional. 		
7	<p><i>Two Decades of Structural Transformation and Dynamics of Income Equality in Indonesia</i></p> <p>Dartanto, dkk. 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 1996, 2005, dan 2014 di 33 provinsi. - Dekomposisi ketimpangan antarsektor ekonomi diukur dengan Indeks Theil dan <i>Mean Log Deviation (MLD)</i>. - Ukuran ketimpangan menggunakan Indeks Gini - Teknik analisis data menggunakan model ekonometrika parametrik dan nonparametrik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Indonesia telah mengalami transisi pertanian-jasa, sebelum sektor industri matang dan terjadi kurva U terbalik Kuznet - Perubahan struktural pembangunan ekonomi berpengaruh pada peningkatan ketimpangan - Peningkatan sektor jasa berpengaruh negatif pada ketimpangan selama periode pengamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran perubahan struktural menggunakan <i>Modified Lilién Indeks (MLI)</i> - Ukuran ketimpangan pendapatan menggunakan Indeks Ketimpangan Relatif - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
8	<p><i>A Direct Test of Kuznets in a Developing Economy: A Cross-District Analysis of Structural Transformation</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 300 kabupaten/kota dari tahun 1992-2017 di Indonesia. - Ukuran perubahan struktural menggunakan <i>share tenaga kerja sektoral</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan struktural dan peningkatan ketimpangan berevolusi dengan cara yang berbeda tergantung pada modalitas perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran perubahan struktural menggunakan

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	<i>and Inequality in Indonesia</i> Yusuf, dkk. 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran ketimpangan menggunakan Indeks Atkinson. - analisis hubungan menggunakan regresi <i>Fixed Effect</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> struktural di Indonesia. - Perubahan struktural berpengaruh pada penurunan ketimpangan selama periode industrialisasi dan peningkatan ketimpangan selama periode tersierisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Modified Lilien Indeks (MLI)</i> - Ukuran ketimpangan pendapatan menggunakan Indeks Ketimpangan Relatif - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi				
9	<i>Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study</i> Davoodi & Zou, 1998	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel di 46 negara periode tahun 1970-1989. - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan pengeluaran pemerintah berdasarkan per kapita - Teknik analisis data menggunakan teknik regresi <i>Ordinary Least Squares</i>. 	Ditemukan korelasi negatif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, tetapi tidak terjadi di negara maju.	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan <i>Enhanced Fiscal Decentralization Indeks (e-FDI)</i>. - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
10	<i>Fiscal Decentralization Contributes To Economic Growth:</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan data <i>cross-sectional</i> pada 50 negara bagian di Amerika Serikat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desentralisasi fiskal berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat.

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	<p><i>Evidence from State-Level Cross-Section Data for The United States</i></p> <p>Akai & Sakata, 2002</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik analisis data menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). 	<ul style="list-style-type: none"> - Definisi dari desentralisasi fiskal menjadi hal yang penting dalam menentukan pengaruh yang ditimbulkannya pada pertumbuhan ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan <i>Enhanced Fiscal Dezentralization Indeks (e-FDI)</i>. - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
11	<p><i>Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe</i></p> <p>Rodríguez-Pose & Krøijer, 2009</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 16 negara periode tahun 1990-2004 di Eropa Tengah dan Timur - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan: persentase pengeluaran daerah, penerimaan pajak, dan transfer ke pemerintah daerah - Teknik analisis data menggunakan regresi model dinamis. 	<p>Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara dua dari tiga indikator desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan <i>Enhanced Fiscal Decentralization Indeks (e-FDI)</i>. - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
12	<p><i>Fiscal Decentralization and Economic Growth In OECD Countries: Is</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel untuk 23 negara OECD dari tahun 1975-2001. - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan 	<p>Desentralisasi fiskal tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	<p><i>There a Relationship?</i></p> <p>Baskaran & Field, 2009</p>	<p>otonomi pajak subfederal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik analisis data menggunakan model ekonometrika. 		<p><i>Enhanced Fiscal Decentralization Indeks (e-FDI).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
13	<p><i>Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indian States</i></p> <p>Ganaie, dkk., 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel untuk 14 negara bagian di India yang tidak terspesialisasi untuk periode 1981–2014. - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan rasio pendapatan pemerintah negara sendiri dan rasio pengeluaran. - Teknik analisis data menggunakan kointegrasi panel dan <i>Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS)</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desentralisasi pengeluaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada produk dalam negeri. - Desentralisasi penerimaan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap produk dalam negeri. - Ukuran keseluruhan desentralisasi fiskal ditemukan berhubungan positif dengan pendapatan negara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan <i>Enhanced Fiscal Decentralization Indeks (e-FDI)</i>. - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
14	<p>Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Apakah Desentralisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan data panel dengan sampel penelitian 457 kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2009-2011. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desentralisasi fiskal tidak mempunyai pengaruh pada pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran desentralisasi fiskal

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	Fiskal Memberikan Dampak yang Signifikan? Putumayor, 2013	- Teknik analisis data menggunakan model <i>Fixed Effect</i> .	- Dampak positif yang lebih besar dari desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi terjadi di kabupaten/kota yang memiliki PAD lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota dengan PAD yang lebih besar.	menggunakan <i>Enhanced Fiscal Decentralization Indeks (e-FDI)</i> . - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
15	Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia, 2008-2012 Khamdana, 2016	- Penggunaan data panel pada 33 provinsi dari tahun 2008-2012 di Indonesia. - Teknik analisis data menggunakan metode <i>Random Effect Model (REM)</i> .	Desentralisasi fiskal tidak terbukti signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap provinsi.	- Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan <i>Enhanced Fiscal Decentralization Indeks (e-FDI)</i> . - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
16	Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	- Menggunakan data panel untuk provinsi di Jawa dan Sulawesi periode tahun 2010- 2013	Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber	- Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat.

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	Kusuma, 2016	- Teknik analisis data menggunakan metode <i>Random Effect Model (REM)</i> .	dari kontribusi belanja daerah.	- Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan <i>Enhanced Fiscal Decentralization Indeks (e-FDI)</i> . - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
Pengaruh Desentralisasi Fiskal pada Ketimpangan Regional				
17	<i>Fiscal Decentralization and Regional Disparity: Evidence from Cross-Section and Panel Data</i> Lessmann, 2009	- Penggunaan data panel pada 23 negara OECD dari tahun 1982-2000 - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan <i>Adjusted Revenue Decentralization Index</i> . - Ukuran ketimpangan regional menggunakan <i>Coefficient of Variation (CoV)</i> , <i>the Adjusted Gini Coefficient (Adgini)</i> , dan <i>The Population-Weighted Coefficient of Variation (WCOV)</i> .	Tingkat desentralisasi yang lebih tinggi dikaitkan dengan disparitas regional yang lebih rendah	- Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan <i>Enhanced Fiscal Decentralization Indeks (e-FDI)</i> . - Ukuran ketimpangan pendapatan menggunakan Indeks Ketimpangan Relatif - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
		<ul style="list-style-type: none"> - Analisis hubungan menggunakan regresi <i>Fixed Effect</i> 		
18	<p data-bbox="296 546 499 909"><i>Income Inequality, Regional Disparities, and fiscal Decentralization in Industrialized Countries</i></p> <p data-bbox="296 965 419 1077">Sacchi & Salotti, 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 23 negara OECD periode tahun 1971-2000. - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan perbedaan tingkat otonomi pengeluaran dan pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya tingkat desentralisasi pajak berhubungan dengan tingginya ketimpangan pendapatan keseluruhan di negara OECD - Disparitas regional yang tinggi berkorelasi dengan desentralisasi pengeluaran yang lebih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan <i>Enhanced Fiscal Decentralization Indeks (e-FDI)</i>. - Ukuran ketimpangan pendapatan menggunakan Indeks Ketimpangan Relatif - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
19	<p data-bbox="296 1541 499 1821"><i>Regional Inequalities, fiscal Decentralization and Government Quality</i></p> <p data-bbox="296 1877 419 1989">Kyriacou, dkk., 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel 23 negara OECD dari tahun 1984-2005. - Ukuran desentralisasi fiskal diukur dengan indikator bagi hasil subnasional - Ukuran ketimpangan 	<p data-bbox="849 1541 1109 1989">Desentralisasi fiskal akan cenderung mengurangi ketidaksetaraan daerah tetapi tidak klaim bahwa perbedaan pendapatan daerah memiliki insiden pada tingkat desentralisasi fiskal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini Penggunaan data panel untuk 27 Kabupaten/ kota di Jawa Barat periode tahun 2010-2021 - Desentralisasi fiskal diukur dengan <i>Enhanced Fiscal</i>

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
		menggunakan koefisien variasi tertimbang populasi. - Analisis hubungan menggunakan <i>System Instrumental Variables (SIV)</i> .		<i>Decentralization Index (e-FDI)</i>
20	Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral dan Ketimpangan Antarkabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Arham, 2014	- Penggunaan data panel berbasis kabupaten/kota dari tahun 2001-2010 di Sulawesi Tengah. - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan rasio penerimaan daerah sendiri dengan pengeluaran daerah - Ukuran ketimpangan regional menggunakan indeks ketimpangan relatif. - Teknik analisis data menggunakan <i>Fixed Effect</i> dengan pembobotan melalui <i>Coefficient Covariance White Cross Section Method</i>	- Desentralisasi fiskal dapat mendorong pergeseran sektor primer - Desentralisasi fiskal berpengaruh pada terjadinya kenaikan ketimpangan antardaerah di Sulawesi Tengah selama periode penelitian	- Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan <i>Enchanced Fiscal Dezentralization Indeks (e-FDI)</i> . - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
21	Siburian 2020	- Penggunaan data panel pada tingkat provinsi dari tahun 2001-2014 di Indonesia	- Desentralisasi fiskal dikaitkan dengan ketimpangan	- Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat.

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
		<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan desentralisasi berbasis pengeluaran. - Teknik analisis data menggunakan model regresi persamaan simultan (SEM). 	<p>regional yang lebih rendah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketika Indeks Desentralisasi Fiskal meningkat sebesar 1 poin, ketimpangan regional berkurang sebesar 0,044 poin. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan <i>Enhanced Fiscal Decentralization Indeks (e-FDI)</i>. - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
22	<p><i>Does Fiscal Decentralization Increases Regional Income Inequality in Indonesia?</i></p> <p>Ashfahany, et al., 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel berbasis kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2008-2017. - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan desentralisasi pembelanjaan. - Ukuran ketimpangan menggunakan Indeks Williamson. - Teknik analisis data menggunakan <i>System Generalized Method of Moments (GMM)</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan antardaerah. - Penyebabnya karena kapasitas fiskal daerah yang rendah sehingga mengakibatkan ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran desentralisasi fiskal menggunakan <i>Enhanced Fiscal Decentralization Indeks (e-FDI)</i>. - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Ketimpangan Regional				
23	<p><i>Growth and Regional Inequality in China During the Reform Era</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel di 204 kota di China 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan yang mendorong pembangunan yang lebih merata akan menghasilkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat.

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	Jones, dkk., 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik analisis data menggunakan model regresi. 	<ul style="list-style-type: none"> pertumbuhan yang lebih cepat. - Tanpa kebijakan dengan perlakuan istimewa ke kota-kota tertentu, proses pertumbuhan di China akan menghasilkan konvergensi pendapatan dan kesetaraan regional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran ketimpangan regional menggunakan Indeks Ketimpangan Relatif. - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel
24	<p><i>Regional Growth and Regional Inequality in EU and Transition Countries: A Spatial Econometric Approach.</i></p> <p>Arbia, dkk., 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel konvergensi di kawasan UE antara tahun 1980-2004. - Ukuran ketimpangan regional menggunakan Indeks Theil. - Teknik analisis data menggunakan model ekonometrika. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan dan ketimpangan dapat dihubungkan melalui hubungan melingkar. - Pertumbuhan pertama-tama dapat menyebabkan ketidaksetaraan, yang pada gilirannya distribusi pendapatan yang terkonsentrasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran ketimpangan regional menggunakan Indeks Ketimpangan Relatif. - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel.
25	<p><i>Economic Growth and Regional Inequality in Romania</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan analisis statistik dan kartografi lintas skala dari kabupaten ke regional dan 	<p>Analisis tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata PDB mengungkapkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat.

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
	Istrate & Horea-Serban, 2017	selanjutnya ke skala nasional selama 25 tahun terakhir di Rumania.	kecenderungan divergensi antar-daerah yang jauh lebih kuat daripada disparitas intraregional.	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran ketimpangan regional menggunakan Indeks Ketimpangan Relatif. - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel.
26	<p><i>Is There Causality Relationship between Economic Growth and Income Inequality? Panel Data Evidence from Indonesia</i></p> <p>Amri & Nazamuddin, 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 26 provinsi dari tahun 2005-2015 di Indonesia. - Teknik analisis data menggunakan Uji Kointegrasi Pedroni, <i>Panel Vector Error Correction Model</i>, dan Uji Kausalitas Granger. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan negatif dan signifikan pada ketimpangan pendapatan. - Dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan tetapi tidak signifikan. - Terdapat kausalitas searah mulai dari ketimpangan pendapatan hingga pertumbuhan ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran ketimpangan regional menggunakan Indeks Ketimpangan Relatif. - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel.

No.	Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
27	<p><i>Economic Growth and Income Disparity between Regencies/Cities in West Java Province</i></p> <p>Lestari & Gunawan, 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan data panel pada kabupaten/kota dari tahun 2005-2014 di Jawa Barat. - Ukuran ketimpangan menggunakan Indeks Theil dan Indeks Williamson. - Teknik analisis data menggunakan korelasi <i>Product Moment</i>, dan analisis <i>trend</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat korelasi positif dengan koefisien korelasi yang rendah. - Pertumbuhan ekonomi naik maka akan menyebabkan peningkatan ketimpangan dan sebaliknya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran ketimpangan regional menggunakan Indeks Ketimpangan Relatif. - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel.
28	<p>Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur</p> <p>Rahmawati & Yuniarti, 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan data panel pada 38 kabupaten/kota dari tahun 2014-2018 di Jawa Timur. - Teknik analisis data menggunakan model analisis regresi data panel <i>Fixed Effect</i>. 	<p>Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan wilayah dengan arah negatif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan data panel pada 27 Kabupaten/kota dari tahun 2011-2021 di Jawa Barat. - Ukuran ketimpangan regional menggunakan Indeks Ketimpangan Relatif. - Teknik analisis data menggunakan SEM dengan model lintasan (<i>path model</i>) dan Uji Sobel

Sumber: Hasil telusur, diolah 2022.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hubungan antarvariabel dapat diketahui, yaitu: a) Hubungan perubahan struktur ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa perubahan struktur ekonomi berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dengan arah positif; b) Hubungan perubahan struktur ekonomi dengan ketimpangan regional menunjukkan bahwa perubahan struktur ekonomi berpengaruh signifikan pada ketimpangan regional dengan arah positif; c) Hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan hasil yang beragam yaitu: terdapat pengaruh positif maupun negatif pada pertumbuhan ekonomi, serta hasil yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan; d) Hubungan desentralisasi fiskal dengan ketimpangan regional, menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan regional dengan arah positif; dan e) Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan regional menunjukkan hasil yang beragam, yaitu terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi pada ketimpangan dengan arah positif maupun negatif.

Studi ini merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian serupa belum banyak dilakukan di Jawa Barat, terutama untuk menguji pengaruh simultan perubahan struktural, desentralisasi fiskal, terhadap ketimpangan regional dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Maka penelitian ini penting untuk dilakukan dengan faktor pembeda dari penelitian penelitian terdahulu, yaitu: a) sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji pengaruh langsung antara dua variabel, sedangkan penelitian ini menguji pengaruh tidak langsung melalui uji pengaruh variabel mediasi dari pertumbuhan ekonomi pada pengaruh perubahan struktur ekonomi dan desentralisasi fiskal pada ketimpangan regional; b) sebagian besar penelitian mempunyai lokus objek penelitian yang luas yaitu antarnegara dan lingkup nasional. Sedangkan penelitian ini menguji hubungan antarvariabel di tingkat subnasional yaitu provinsi Jawa Barat dengan data panel berbasis 27 kabupaten/kota periode tahun 2010-2021; dan c) metode analisis hubungan antarvariabel pada studi ini menggunakan perangkat statistik *Structural Equation Modelling (SEM)* melalui metode analisis jalur (*path analysis*) secara simultan.

H. Operasionalisasi Variabel

Model penelitian yang menggambarkan hubungan kausalitas antarvariabel dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pada teori untuk diuji secara empiris yang terdiri dari dua variabel utama, yaitu:

1. Variabel eksogen, merupakan variabel bebas (*independent variable*) pada model penelitian, yaitu: perubahan struktur ekonomi (SC) dan desentralisasi fiskal (FD).
2. Variabel endogen, merupakan variabel terikat (*dependent variable*) yang terdiri dari: a) Variabel endogen *mediating* merupakan variabel yang menjadi perantara pada pengaruh tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen, yaitu pertumbuhan ekonomi (G); dan b) Variabel endogen terikat merupakan variabel yang mendapat pengaruh baik oleh variabel eksogen maupun variabel endogen *mediating*, yaitu ketimpangan regional (RI).

Semua variabel, baik eksogen maupun endogen merupakan variabel terukur (*measured variable*) yaitu variabel yang bisa dilakukan pengukuran secara empiris atau biasa disebut dengan indikator. Pada model penelitian dengan diagram lintasan (*path model*), variabel terukur biasa disimbolkan dalam bentuk kotak atau bujur sangkar.⁴⁶ Lebih jelas operasionalisasi variabel disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Rumus	Skala
Perubahan Struktur Ekonomi	Perubahan struktur ekonomi domestik dari sektor pertanian tradisional subsisten, bergeser ke sektor manufaktur dan	Pergeseran sektor primer yang diukur dengan Indeks Perubahan Struktural ⁴⁷	<p><i>Modified Lilien Indeks</i> ($MLI_{s,t}$):</p> $\sqrt{\sum_{i=1}^n x_{[is]} \cdot x_{[it]} \left(\ln \frac{x_{[it]}}{x_{[is]}} \right)^2}$ <p>Dimana: x_i : Kontribusi sektor t : Tahun analisis s : Tahun sebelumnya</p>	Rasio

⁴⁶ Setyo Hary Wijanto, *Structural Equation Modeling (SEM) dengan Lisrel 8.8* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 10-11.

⁴⁷ Dietrich, "Does Growth Cause Structural Change," hlm. 927-928

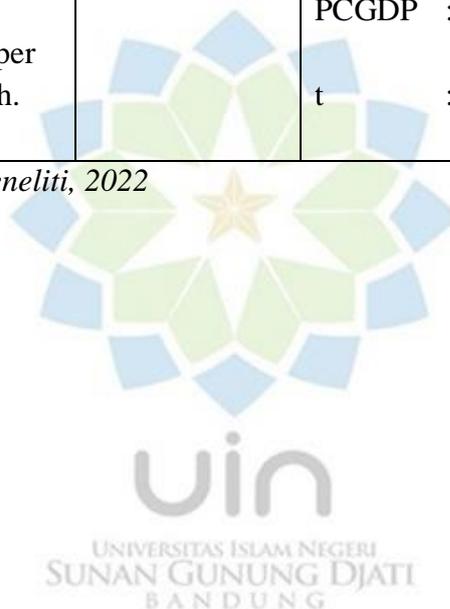
Variabel	Definisi	Indikator	Rumus	Skala
	sektor jasa yang beragam secara industri, lebih modern dan lebih urban.			
Desentralisasi Fiskal	Transfer anggaran dan kewenangan kepada pemerintah subnasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik.	Indeks Desentralisasi Fiskal ⁴⁸	<p><i>Enhanced Fiscal Decentralization Indeks (e-FDI)</i>:</p> $\sqrt{\left(\frac{OSR_i}{E_i} + k_i\right) \cdot \left(\frac{E_i}{TE}\right)}$ <p>Dimana, OSR : Pendapatan Asli Daerah (PAD) E : Belanja Daerah TE : Total belanja di semua tingkatan pemerintahan K : Koefisien penyesuaian</p>	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi	Perubahan peningkatan kemampuan produksi barang dan jasa dalam periode waktu tertentu.	Pertumbuhan ekonomi daerah tahunan yang dihitung berdasarkan <i>output</i> PDRB ⁴⁹	<p>Pertumbuhan ekonomi</p> $(GRW_t) : \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$ <p>Dimana, PDRB : PDRB Kab/kota t : Tahun analisis t-1 : Tahun sebelumnya</p>	Rasio

⁴⁸ Duc Hong Vo, *The Economics of Measuring Fiscal Decentralization*, (University of Western Australia, 2008), hlm. 60.

⁴⁹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 142.

Variabel	Definisi	Indikator	Rumus	Skala
Ketimpangan Regional	Perbedaan pendapatan per kapita antardaerah yang dengan membandingkan antara pendapatan per kapita provinsi dengan pendapatan per kapita daerah.	Indeks Ketimpangan Relatif ⁵⁰	Indeks Ketimpangan Relatif: $\left \frac{PCGDP_{it}}{PCGDP_t} - 1 \right $ Dimana, PCGDP _i : Pendapatan per kapita kabupaten/kota PCGDP : Pendapatan per kapita provinsi t : Tahun analisis.	Rasio

Sumber: Data diolah peneliti, 2022



⁵⁰ Bonet (2005) dalam Muhammad Amir Arham, “Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral, dan Ketimpangan Antarkabupaten/Kota di Sulawesi Tengah,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 14.2 (2014), hlm. 150.